

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2011-2015 DI DESA WONO HARJO
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

ENDAH VESTIKOWATI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Berdasarkan hasil peninjauan penulis bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 ?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi lapangan (observasi dan wawancara).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa :1) Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program. 2) adanya hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 yang antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Keluarga Harapan*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Program Keluarga Harapan menurut Buku pedoman Umum PKH (2013:13) menyatakan bahwa : Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin keluarga sangat miskin (RTSM KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Begitupula dengan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal, hal ini terbukti dengan adanya permasalahan sebagai berikut:

1) Realisasi pelaksanaan bantuan kementerian sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga miskin dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak objektif, seperti masih adanya ketidakakuratan data mengenai penerima program. Contohnya penerima program ada yang sudah pindah dan bukan lagi sebagai warga di desa Wonoharjo bahkan ada yang masuk penerima PKH padahal orangnya sudah meninggal hal ini terjadi sebagai akibat data yang digunakan oleh BPS merupakan data

lama dan tidak dilakukan verifikasi lagi.

2) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat penerima program terkait berbagai persyaratan yang harus dilengkapi sehingga masih banyak masyarakat yang termasuk kategori penerima manfaat tidak memperoleh bantuan dana program. Contohnya petugas kurang secara rutin melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai ketentuan dalam memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan.

3) Adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan program sehingga masyarakat yang tergolong mampu memperoleh bantuan program sementara masyarakat yang tidak mampu atau yang termasuk kategori penerima bantuan program tidak memperoleh bantuan. Contohnya di Desa Wonoharjo berdasarkan data yang diperoleh terdapat 65 orang penerima PKH namun terdapat 21 orang penerima PKH yang tidak sesuai dengan kategori penerima manfaat mengingat mereka tergolong mampu.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 ?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 ?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?

LANDASAN TEORITIS

Tangkilisan (2003:18). implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implemementasi kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Wahab (2014:165) antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Program Keluarga Harapan menurut Buku pedoman Umum PKH (2013:13) menyatakan bahwa : Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang

terdiri dai 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi lapangan (observasi dan wawancara)dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).Adapun teknik analisi data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Artinya bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 sudah sesuai dengan pendapat Wahab, (2014:165) mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi implemementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini petugas dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan kurang

baik hal ini dikarenakan masih kurangnya petugas dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PKH baik jangka pendek maupun jangka panjang. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa standar/ukuran dan tujuan kebijakan yang ditetapkan kurang dipahami oleh petugas pelaksana PKH.

Menurut pendapat Sulaeman, (1998:67) mengemukakan bahwa :

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kebijakan PKH ini, bahwa bantuan ini sebagian belum tepat sasaran yang artinya dalam penyelenggaraannya belum dikatakan memenuhi standar ukuran pada kebijakan itu sendiri, masih perlu ditertibkan oleh pengurus serta pemerintah sendiri.

1. Sumber-sumber kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan kurang dilaksanakan dengan baik sesuai hal ini dikarenakan kurang ditunjang oleh sumber-sumber

kebijakan seperti pendamping atau fasilitator, kurangnya pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana.

Widodo (2007:109) menegaskan bahwa:

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Dengan demikian diketahui bahwa kinerja yang kurang baik dalam pelaksanaan program ini membawa dampak yang buruk bagi kebijakan bantuan ini, ada masalah yang ditimbulkan yaitu, dengan kurang optimalnya pelatihan bagi petugas pelaksana.

2. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara kelembagaan program PKH ini telah diatur sesuai dengan ketentuan komposisi pelaksana, Program ini telah berjalan cukup sesuai dengan pedomannya, jalannya program ini sangat ditentukan pula dari pelaksana atau pengurus di setiap desa, sampai ke kecamatan.

Menurut Agustinus (2006:126) menyatakan bahwa :

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan PKH petugas memiliki garis koordinasi yang telah ditetapkan dari pusat ke daerah, sudah baik adanya atau sudah tepat, hubungan yang baik antar pengurus/pendamping sangat mempengaruhi jalannya program ini, baik di setiap kegiatan atau program yang ada.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan komunikasi yang dilakukan antar organisasi pelaksana yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya beberapa permasalahan terkait perencanaan yang kurang melibatkan petugas pelaksana.

Menurut Widodo (2007:114) menyatakan bahwa :

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa

yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan kerja sama antara pengurus PKH dengan pemerintah setempat, salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah koordinasi mengenai program-program yang ada di kecamatan antara Pendamping PKH, dan Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan dan, kepala desa di setiap desa.

4. Sikap para pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya kesadaran dari pelaksana dalam implementasi program keluarga harapan serta komitmen yang jelas dari pelaksana dalam implementasi program keluarga harapan dan kurangnya petugas yang kompeten dalam implementasi program keluarga harapan.

Menurut Agustinus (2006: 89) menyatakan bahwa :

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

pendek maupun jangka panjang, sehingga menyebabkan pendamping kurang mengetahui permasalahan-permasalahan dalam implementasi program PKH pada tahun sebelumnya serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Menurut pendapat Agustino (2014:139) sebagai berikut :

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai.

Dengan demikian implementasi program PKH oleh petugas belum terlaksana dengan baik karena adanya hambatan-hambatan petugas seperti petugas kesulitan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang.

2. Sumber-sumber kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan dalam implementasi program PKH yang disebabkan kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam memperolancar program keluarga harapan seperti pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan program keluarga harapan kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut Subarsono, (2011: 90) menyatakan sebagai berikut :

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Berdasarkan pendapat tersebut maka sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan implementasi program PKH sehingga peran ketersediaan SDM yang memadai serta kemampuan yang baik dalam melaksanakan kebijakan sangat berperan penting untuk terlaksana suatu kebijakan.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan seperti kurang memadainya jumlah tenaga pelaksana dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam implementasi program keluarga harapan.

Subarsono, (2011:91) menyatakan sebagai berikut :

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

Uraian tersebut menjelaskan bahwa hambatan-hambatan oleh pelaksana PKH disebabkan karena kurangnya dukungan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh petugas hal ini

dikarenakan dengan kurangnya sikap yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan PKH.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan seperti kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan implementasi program keluarga harapan sehingga pendamping melaksanakan program PKH kurang sesuai dengan ketentuan yang direncanakan serta kurang jelasnya instruksi yang disampaikan kepada petugas dalam implementasi program keluarga harapan.

Menurut Subarsono (2011:91) menyatakan bahwa :

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa dalam implementasi PKH untuk mengatasi hambatan maka peran komunikasi antar petugas pelaksana sangat penting sehingga pemahaman terhadap program akan semakin baik dan akan mengurangi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan suatu program kebijakan.

5. Sikap para pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan seperti : kurangnya kesadaran dari pelaksana dalam implementasi program

keluarga harapan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dalam pelaksanaan program PKH serta kurangnya petugas memiliki kompetensi dalam implementasi program keluarga harapan yang disebabkan kurangnya dilakukan pelatihan kepada petugas pelaksana.

Menurut Wahab (2014:167) menyatakan sebagai berikut :

Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan

Dengan demikian kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dengan baik sehingga pelaksana program PKH harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kebijakan dan memiliki keinginan kuat dalam melaksanakan kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan seperti kurangnya anggaran yang memadai dalam implementasi program keluarga harapan sehingga kurang membantu petugas dalam melaksanakan

program PKH dengan baik serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi program keluarga harapan sehingga petugas kurang melaksanakna program dengan baik.

Menurut Widodo (2007:57) menyatakan bahwa :

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Berdasarkan uraian tersebut maka keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik artinya bahwa dengan adanya lingkungan sosial ekonomi dan politik yang kondusif maka dapat menunjang terlaksananya kebijakan dengan lancar sesuai dengan harapan.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran

2011-2015 di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya upaya antara lain seperti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait sehingga pendamping memperoleh data untuk melakukan evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap pelaksanaan PKH baik secara jangka pendek maupun jangka panjang sehingga pendamping mengetahui permasalahan-permasalahan dalam implementasi program PKH pada tahun sebelumnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat

Menurut Agustino (2006:164) menyatakan sebagai berikut :

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut bahwa untuk meningkatkan terlaksananya

implementasi kebijakan program PKH maka pelaksana harus memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan serta standar yang ditetapkan dalam implementasi kebijakan dengan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi mengenai ketentuan implementasi kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya yang antara lain melakukan kerjasama dengan pendamping atau fasilitator dalam memperlancar implementasi program keluarga harapan sehingga pendamping dapat melaksanakan perannya dalam melaksanakan program PKH dengan baik dan memberikan masukan supaya pelatihan yang diselenggarakan dalam meningkatkan kemampuan pelaksana mengimplementasikan program keluarga harapan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Widodo, (2007:194) menegaskan bahwa:

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya yang antara lain : melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga tenaga pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam implementasi program keluarga harapan dan menyediakan peralatan dalam implementasi program keluarga harapan.

Menurut Agustino (2014:149) menyatakan bahwa :

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur organisasi.

Dengan demikian implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika pelaksana memperoleh dukungan yang baik dalam bentuk adanya struktur organisasi yang jelas adanya pendelegasian wewenang yang jelas sehingga petugas dapat mengimplementasikan kebijakan secara optimal.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya yang antara lain : melibatkan petugas dalam perencanaan implementasi program keluarga harapan sehingga pendamping melaksanakan program PKH sesuai dengan ketentuan yang direncanakan serta memberikan instruksi yang disampaikan kepada petugas secara jelas dalam implementasi program keluarga harapan

Widodo. (2007:97) menyatakan bahwa :

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif (dalam) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*).

Dengan demikian maka jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Melalui kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

5. Sikap para pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya yang antara lain : meningkatkan kesadaran dari pelaksana dalam implementasi program keluarga harapan sehingga pemahaman terhadap ketentuan dalam pelaksanaan program PKH meningkat dan meningkatkan

komitmen yang jelas dari pelaksana dalam implementasi program keluarga harapan.

Subarsono (2011:68) menyatakan sebagai berikut :

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan artinya bahwa dengan semakin baiknya sikap pelaksana terhadap kebijakan maka implementasi dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan implementasi program yang ditetapkan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya yang antara lain : melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi hambatan ketersediaan anggaran yang kurang memadai dalam implementasi program keluarga harapan sehingga dapat membantu petugas dalam melaksanakan program PKH dengan baik dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang jelas berupa petunjuk teknis implementasi program keluarga harapan.

Menurut Subarsono (2011:78) menyatakan sebagai berikut :

Sejauhmana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik, dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

Dengan demikian dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mendukung implementasi kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dengan optimal sehingga keberhasilan program PKH dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif sehingga pelaksana dapat melaksanakan kebijakan secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah

baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program.

2. Adanya hambatan yang antara lain kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan, kurangnya dukungan pihak yang terkait dalam hal ini UPPKH Kabupaten dalam implementasi Program Keluarga Harapan sehingga menyebabkan kurang membantu pendamping dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, masih kurangnya dilakukan pelatihan bagi pendamping sehingga belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dan cenderung menunggu arahan dari UPPKH Kabupaten, kurangnya dukungan basis data yang dapat dijadikan dasar bagi pendamping dalam melakukan verifikasi terhadap penerima program keluarga harapan.
3. Adanya upaya dalam mengatasi hambatan yang antara lain : melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan

sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas. melakukan kerjasama dengan UPPKH Kabupaten dalam membantu pendamping dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait implementasi program keluarga harapan, meminta UPPKH Kabupaten memberikan pelatihan dan pengarahan secara rutin kepada pendamping PKH sehingga dapat meningkatkan kemampuan pendamping dalam mengimplementasikan program PKH sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. melakukan penambahan berbagai fasilitas dalam pembuatan basis data yang dapat digunakan pendamping PKH dalam melakukan verifikasi terhadap penerima program keluarga harapan sehingga penerima program sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Mengingat Program Keluarga Harapan telah diimplementasikan dengan baik maka sebaiknya pendamping mempertahankan indikator-indikator yang dinilai sudah baik dan meningkatkan indikator yang masih kurang seperti meningkatkan kerjasama dengan UPPKH Kabupaten sehingga pendamping dapat menambah pemahaman dalam pelaksanaan program, melakukan verifikasi langsung ke masyarakat untuk mengetahui kebenaran data yang diajukan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan dalam program PKH sehingga penerima program sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan, menyediakan berbagai peralatan yang menunjang pendamping PKH dalam melaksanakan perannya.

2. Untuk meminimalisir berbagai hambatan maka sebaiknya pendamping melakukan kegiatan seperti meningkatkan koordinasi dengan pendamping di UPPKH tingkat kabupaten sehingga dapat mengatasi kesulitan pendamping atau fasilitator dalam memperlancar implementasi program keluarga harapan dan meningkatkan kemampuan pendamping PKH melalui peningkatan kegiatan pelatihan maupun pengarahan sehingga pendamping dapat melaksanakan program PKH sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan
3. Supaya upaya yang telah dilaksanakan ada perbaikan maka pendamping sebaiknya melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan pertemuan antar pendamping di lingkup Kabupaten sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman pendamping dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan, melakukan kerjasama dengan pihak terkait sehingga pendamping memperoleh dukungan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam implementasi program keluarga harapan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Martoyo, Susilo. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta

Nurul Zuriyah, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung; Rafika Aditama

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman.

Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

2. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.